



LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN NGESTIHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGESTIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan

- Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 13. Peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 15. Peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan

- Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Bantuan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 134);
 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 138);
 26. Peraturan Desa Ngestiharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngestiharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngestiharjo Tahun 2019 Nomor 4);
 27. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 11);
 28. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 12);
 29. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2021 Nomor 3);
 30. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 4 tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGESTIHARJO

dan

LURAH NGESTIHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	45.300.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	5.296.885.150,00
c. Pendapatan lain-lain	Rp	9.945.000,00
Jumlah pendapatan	Rp	5.352.130.150,00

2. Belanja kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp	2.218.379.764,00
b. Bidang Pembangunan	Rp	2.067.671.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	486.409.686,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	318.810.000,00
e. Bidang Penanggulangan Kebencanaan	Rp	803.675.000,00
Jumlah	Rp	5.894.945.650,00
Surplus/defisit		(542.815.500,00)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan pembiayaan (SILPA 2021)	Rp	542.815.000,00
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp	542.815.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	0
Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran 2021	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat APBKal.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngestiharjo.

Ditetapkan di Ngestiharjo

pada tanggal 31 Desember 2021

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN NGESTIHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGESTIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	45.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.296.885.150,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.945.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.351.185.150,00	

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGESTIHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	45.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.296.885.150,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.945.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.352.130.150,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</u>	<u>2.218.379.764,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk	1.763.914.916,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	67.300.752,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.300.752,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	812.884.476,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	812.884.476,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	17.840.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.840.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa	570.433.922,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	570.433.922,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL)	105.840.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	105.840.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkan	20.262.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.262.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.925.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.925.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	1.200.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Ba muskal	93.228.766,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	93.228.766,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan B amuskal	45.000.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	52.575.118,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.675.118,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.675.118,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	39.900.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	29.811.464,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	23.520.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.520.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.291.464,00	ADD, PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.291.464,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	278.203.266,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	39.710.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.710.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.592.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.592.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.915.000,00	DDS, DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.915.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	40.943.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.943.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	33.825.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.825.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	11.478.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.478.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.698.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.698.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	60.042.266,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.042.266,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	50.000.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	93.875.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	88.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	5.875.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.875.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN</u>	<u>2.067.671.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	187.915.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	155.915.000,00	DDS, PBK
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.915.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	32.000.000,00	PBK
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	328.785.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb)	15.010.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.010.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	159.334.000,00	DDS, PBK
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.334.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	46.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	33.754.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.754.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	44.937.500,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.937.500,00	
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	5.850.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	23.900.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.098.135.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	410.767.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	398.767.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	624.368.200,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.294.200,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	619.074.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan (Dipilih)	63.000.000,00	PBP
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	218.835.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	92.780.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.780.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan (Penampungan, Bank Sampah, dll)	105.715.500,00	DDS, PBK
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.805.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	37.910.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	20.340.000,00	PBK
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	20.340.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	50.500.000,00	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	50.500.000,00	DDS
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	133.500.000,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	133.500.000,00	PBK
2.6.06	5.3.	Belanja Modal	133.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	50.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan(Dipilih)	50.000.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	48.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>486.409.686,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	270.440.300,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	49.970.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.970.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	34.000.000,00	DDS, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	25.000.000,00	DDS, PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	151.477.800,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.477.800,00	
3.1.95		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	9.992.500,00	DDS
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.992.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	119.834.386,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	60.264.386,00	DDS, PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.264.386,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.425.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.425.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	47.145.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.145.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	20.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	76.135.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	15.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	34.135.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.135.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.000.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>318.810.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	26.812.500,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	26.812.500,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.812.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	173.025.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)	22.550.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.550.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	150.475.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.475.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	108.972.500,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	53.410.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	835.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	52.575.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	40.562.500,00	DDS, PBK
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.562.500,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	15.000.000,00	DDS
4.7.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN</u>	<u>303.675.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	44.075.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	44.075.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	44.075.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	759.600.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	759.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	759.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.894.945.650,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(542.815.500,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	542.815.500,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	542.815.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
------------------	--------	--------------------	------------